

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Tercapainya tujuan pendidikan melalui kegiatan pembelajaran di sekolah dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah ketersediaan fasilitas pendidikan yang sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP). Hayati & Harianto (2017) menjelaskan bahwa terdapat beberapa keuntungan bagi sekolah yang memiliki kelengkapan fasilitas pendidikan, antara lain: (1) menumbuhkan gairah dan motivasi guru dalam mengajar serta dapat mendorong peserta didik untuk belajar, sehingga pembelajaran akan menjadi efektif; dan (2) memberikan kemudahan dalam menentukan berbagai pilihan pada peserta didik untuk belajar, sehingga proses pembelajaran akan lebih bervariasi.

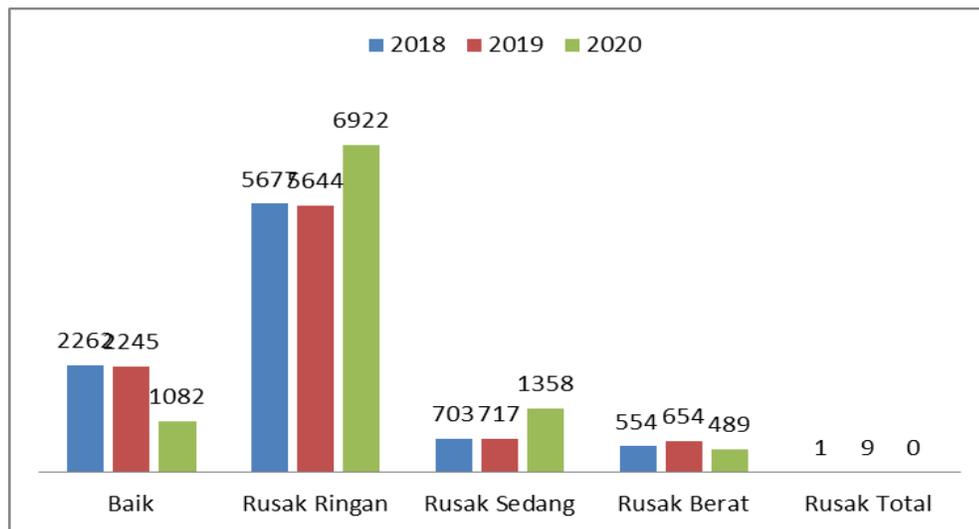
Hai ini relevan dengan yang disampaikan oleh Centerwall & Nolin (2019), bahwa dalam rangka menciptakan sebuah lembaga pendidikan yang efektif dan efisien melalui pengelolaan keuangan, maka fasilitas pendidikan yang memadai juga memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan dari pendidikan tersebut. Hal senada juga disampaikan oleh Lunenburg (2011) bahwa “*School buildings across the nation are aging and becoming a barrier to optimal learning and teaching*” yang mengandung pengertian bahwa bangunan yang kurang mendukung akan menjadi penghambat proses pembelajaran yang optimal. Kelengkapan fasilitas pendidikan akan membantu guru dalam menyelenggarakan proses pembelajaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Timilehin (2012) mengungkapkan bahwa:

*“The study revealed that there was a significant relationship between school facilities and students’ achievement in the affective domain as well as a significant relationship between school facilities and students’ achievement in the psychomotor domain of learning”.*

Terdapat hubungan yang signifikan antara fasilitas sekolah dengan prestasi belajar siswa pada ranah afektif serta hubungan yang signifikan antara fasilitas sekolah dengan prestasi belajar siswa pada ranah psikomotorik.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan (wawancara) terhadap Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung (Rabu, 22 Juli 2020) bahwa kebutuhan fasilitas pendidikan di sekolah dasar semakin meningkat dari tahun ke tahun, mengingat banyaknya jumlah peserta didik dan guru yang ada. Sementara pemenuhan jumlah fasilitas pendidikan tersebut hanya dipenuhi dengan cara pembelian melalui dana BOS, bantuan pemerintah (baik dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten). Beliau menuturkan, perbaikan ruang kelas menjadi lebih baik tetapi tidak pernah beres.



**Gambar 1. 1** Kondisi Ruang Kelas SD di Kabupaten Bandung

Sumber: NDP Kemendikbud (2020)

Secara terperinci data kondisi ruang kelas di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1. 1** Kondisi Ruang Kelas SD di Kabupaten Bandung 2018-2020

|      | Baik | %     | Rusak Ringan | %     | Rusak Sedang | %     | Rusak Berat | %    | Rusak Total | %    |
|------|------|-------|--------------|-------|--------------|-------|-------------|------|-------------|------|
| 2018 | 2262 | 24.59 | 5677         | 61.73 | 703          | 7.64  | 554         | 6.02 | 1           | 0.01 |
| 2019 | 2245 | 24.22 | 5644         | 60.89 | 717          | 7.74  | 654         | 7.06 | 9           | 0.1  |
| 2020 | 1082 | 10.98 | 6922         | 70.27 | 1358         | 13.79 | 489         | 4.96 | 0           | 0    |

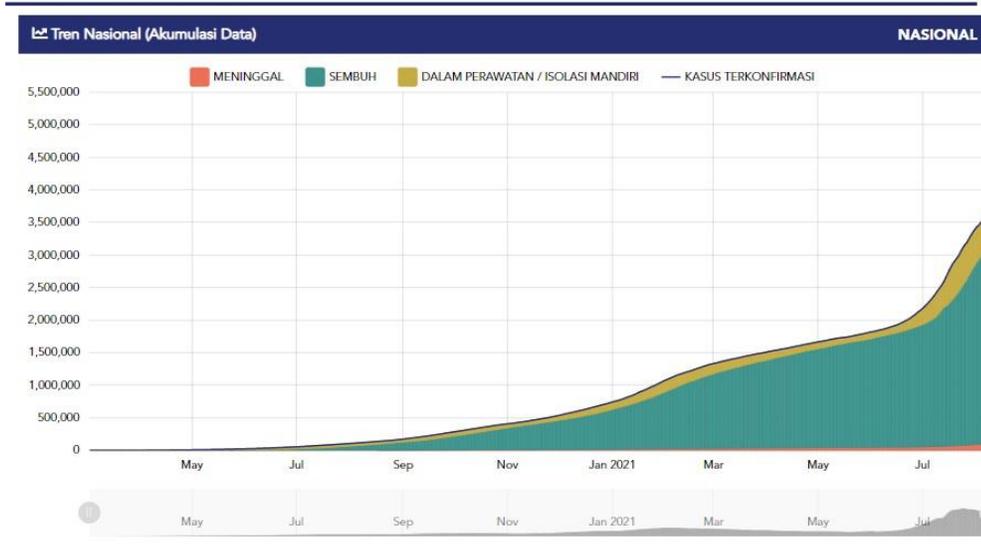
Masalah yang sama terjadi di Ghana. Menurut Ampofo et.al. (2020), beberapa bangunan sekolah dasar dan menengah negeri di Ghana memiliki kondisi yang memprihatinkan.

*The Minister for Housing (Hon. Atta Akyia) who speaking to joy news on his visit to some public basic and senior high schools' buildings in Wa Municipality and Eastern Region is reported to have said that; "The state of conditions of government school buildings in Ghana is bad".*

Menteri Perumahan Rakyat (Hon. Atta Akyia) yang menyampaikan kabar atas kunjungannya ke beberapa gedung sekolah dasar dan sekolah menengah atas negeri di Kotamadia Wa dan Wilayah Timur. Beliau mengatakan bahwa: "Kondisi gedung sekolah negeri di Ghana sangat buruk". Begitu pula yang terjadi di Nepal, gempa bumi yang terjadi di Nepal tahun 2015 menyebabkan kerusakan yang cukup signifikan pada lebih dari 7.000 fasilitas sekolah serta banyak siswa dan guru yang kehilangan nyawa. (Adhikari et.al., 2018).

*In the past, many earthquakes have caused destructive damage to school facilities and many young students as well as teachers have lost their lives. More recently, the 2015 Nepal earthquakes caused collapse or significant damage to more than 7,000 school facilities.*

Selain kondisi ruang kelas yang buruk, di Kabupaten Bandung masih banyak sekolah dasar yang kekurangan alat peraga edukatif, sehingga menyulitkan guru melaksanakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kondisi pandemik saat ini, menambah buruk keadaan fasilitas pendidikan di sekolah dasar. Apalagi jika dilihat dari tren perkembangan kasus terkonfirmasi positif sejak Januari 2021 sampai bulan Juli 2021 semakin meningkat. Diketahui bahwa 1 Januari 2021 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 8.074 kasus, sedangkan pada 1 Juli 2021 melonjak secara signifikan menjadi 24.836 kasus. Gambaran tren kasus terkonfirmasi Covid-19 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



**Gambar 1.2 Tren Nasional Kasus Covid-19**  
 Sumber: <https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19>

Sistem pendidikan kita harus siap melakukan lompatan untuk melakukan transformasi pembelajaran daring bagi semua peserta didik dan oleh semua guru (Purwatiningsih & Mulianingsih, 2020). Gusty dkk. (2020) menyatakan bahwa kita berada di era 4.0 sudah seharusnya membangun kreativitas, mengasah *skill* peserta didik dan meningkatkan kualitas diri dengan perubahan sistem, cara pandang dan pola interaksi kita dengan teknologi. Peralihan pola pembelajaran yang biasanya dilakukan dengan tatap muka antara tenaga pengajar dan peserta didik menjadi pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran. Namun, metode pembelajaran dengan menggunakan aplikasi teknologi bukan tanpa masalah. Ada beberapa masalah yang sebenarnya cukup signifikan yang dihadapi, diantaranya keterbatasan fasilitas pendidikan pendukung pembelajaran jarak jauh.

Menurut Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung bahwa pada tahun 2020 tidak ada pembangunan fasilitas pendidikan di sekolah dasar yang berasal dari dana APBD karena adanya proses realokasi atau penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020 untuk penanganan Covid-19. Hal ini sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka

Sri Wulansari, 2021

**MANAJEMEN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN FASILITAS PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR**  
 Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](https://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](https://perpustakaan.upi.edu)

Percepatan Penanganan Covid-19. Sejalan dengan itu, Menteri Keuangan Pemerintah Republik Indonesia mewajibkan pemerintah daerah mengalokasikan dana kesehatan dalam APBD untuk penanganan Covid-19. Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyaluran dan Penggunaan DBH, DAU dan DID Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19.

Keterbatasan kemampuan pemerintah tersebut menjadi kendala besar dalam pembangunan fasilitas pendidikan yang sesuai dengan standar sarana dan prasarana pendidikan. Padahal UUD Negara Indonesia tahun 1945 (yang sudah diamandemen) memberikan amanat kepada pemerintah untuk menetapkan anggaran pendidikan 20 persen dari anggaran belanja negara seperti tertuang pada pasal 31 Ayat 4 bahwa:

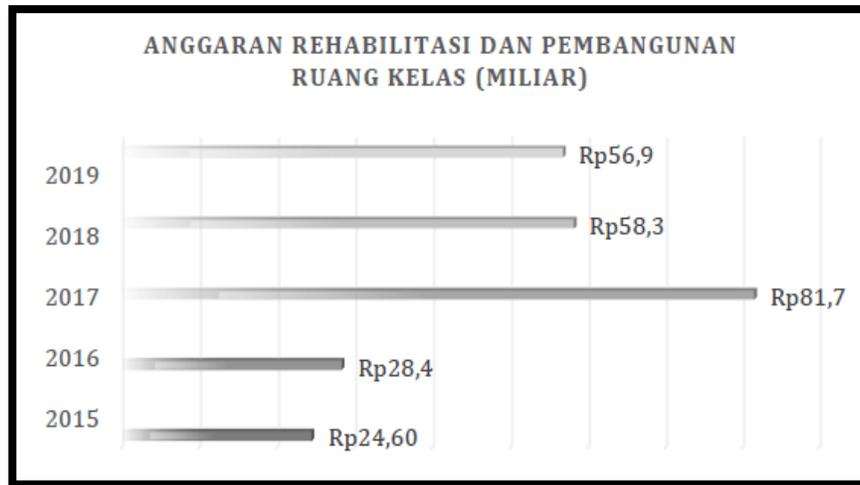
“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.

Hal ini relevan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/MA yang menjelaskan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan proses pembelajaran di sekolah yang seharusnya ada, berfungsi, cukup dalam jumlah dan memenuhi spesifikasi untuk menunjang proses belajar.

Berbagai kebijakan pemerintah tersebut mempertegas bahwa fasilitas pendidikan tetap harus terus menerus di data dan diperbaiki kondisinya agar bertahap memenuhi standar, karena berfungsi atau tidaknya fasilitas pendidikan sangat menentukan keberhasilan proses pembelajaran di sekolah (Ananda & Banurea, 2017).

Pemerintah sudah melakukan upaya rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas sekolah di Indonesia dengan anggaran yang besar setiap tahunnya. Hal itu diharapkan akan meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan Indonesia. Anggaran yang rutin dan berjumlah besar untuk rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas tersebut dilakukan karena banyaknya ruang kelas untuk sekolah-sekolah dari tingkat SD, SMP sampai

SMA dan SMK dalam kondisi yang rusak, baik ringan, sedang maupun berat. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



**Gambar 1.3 Anggaran Rehabilitasi dan Pembangunan Ruang Kelas 2015-2019**  
Sumber: Dirjen Anggaran Kemenkeu, 2019

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pertumbuhan perbaikan dan pembangunan ruang kelas di Indonesia tersebut sangat lambat, seperti terbatasnya anggaran dan tata kelola yang buruk yang berpotensi terjadi praktik korupsi (Bustari, 2016).

Dalam kondisi dana yang sangat terbatas dan sekolah dihadapkan pada kebutuhan yang beragam, maka sekolah harus mampu membuat keputusan dengan tetap berpedoman pada peningkatan mutu (Ferdin, 2013). Manakala sekolah memiliki rencana untuk mengadakan perbaikan fasilitas seperti pagar sekolah atau merencanakan pengadaan alat laboratorium, maka sekolah perlu mempertimbangkan prioritas mana yang diasumsikan memiliki pengaruh yang dominan terhadap peningkatan mutu proses belajar mengajar. Hal tersebut didasari oleh kenyataan bahwa sekolah yang paling mengetahui kebutuhan fasilitas pendidikan, baik kecukupan, kesesuaian, maupun kemutakhirannya, terutama fasilitas pendidikan yang erat kaitannya secara langsung dengan proses pembelajaran (Indrawan, 2015).

Kepala sekolah sebagai perencana anggaran, harus memahami manajemen pembiayaan sekolah terutama dalam pengelolaan dan pemanfaatan semua kebutuhan

sekolah (Myende et al., 2018). Manajemen pembiayaan sekolah sangat penting dalam hubungannya dengan pelaksanaan kegiatan sekolah (Said, 2018). Seorang kepala sekolah harus memiliki ilmu pengetahuan tentang manajemen, khususnya manajemen pembiayaan, karena untuk menjalankan seluruh kegiatan yang ada di sekolah tidak terlepas dari pengolahan dana. Dana yang diperoleh atau diberikan oleh pemerintah, maupun pihak lainnya memerlukan manajemen yang baik. Sebesar apapun dana sekolah bila tidak dikelola dengan manajemen yang baik, maka sekolah tersebut akan mengalami suatu kemunduran (Rangongo et al., 2016).

Manajemen pembiayaan harus ditangani secara serius, sistematis, dan penuh tanggung jawab untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena manajemen pembiayaan yang efisien akan memastikan adanya keuntungan bagi lembaga pendidikan (Kenayathulla dan Banu, 2010). Sebuah lembaga pendidikan yang bagus, tentunya memiliki pengelolaan keuangan yang bagus pula guna mencapai target yang telah ditetapkan bersama. Selain itu sekolah dituntut memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengurus kepentingan sekolah menurut kebutuhan dan kemampuan sendiri serta berdasarkan pada aspirasi dan partisipasi warga sekolah dengan tetap mengacu pada peraturan dan perundangan-undangan pendidikan nasional yang berlaku. Hal itu terutama ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan (Novita, 2017).

Alkadri (2018) menyebutkan bahwa manajemen pembiayaan pembangunan fasilitas pendidikan adalah sebuah kompleksitas, yang didalamnya terdapat saling keterkaitan pada setiap komponennya, yang memiliki rentang yang bersifat mikro (satuan pendidikan) hingga makro (nasional), meliputi sumber-sumber pembiayaan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaannya serta akuntabilitas hasilnya yang diukur dari perubahan-perubahan yang terjadi pada semua tatanan (khususnya sekolah).

Penyalahgunaan atau kesalahan dalam pengelolaan merupakan indikasi bahwa dana pembangunan belum dikelola dengan baik dan profesional. Bisa jadi inilah yang menjadi salah satu penyebab mengapa fasilitas pendidikan di sekolah dasar masih belum menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Oleh karena itu, dana yang

diperoleh dari pemerintah maupun pihak lain memerlukan pengelolaan yang baik karena manajemen adalah elemen penunjang untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan sebuah organisasi (Kurniawan, 2016).

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang mengkaji masalah-masalah manajemen pembiayaan pembangunan fasilitas pendidikan yang terjadi dilapangan secara terpisah-pisah. Penelitian ini menggagas dan mengembangkan keterpaduan unsur-unsur manajemen pembiayaan (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban, pengawasan, serta pelaporan) dalam mengelola pembiayaan pembangunan fasilitas pendidikan. Manajemen pembiayaan terpadu adalah rangkaian aktivitas yang mengatur keuangan lembaga, yang dilakukan menjadi satu dan sistematis sehingga masalah-masalah yang dimunculkan dalam penelitian bisa dicarikan solusinya dalam bentuk model yang memiliki kontribusi secara keilmuan untuk bidang studi administrasi pendidikan dan secara praktis mengatasi masalah-masalah yang terjadi di sekolah.

Selain itu, pembiayaan pendidikan secara keilmuan berada pada tata kelola sekolah yang salah satu unsurnya adalah fasilitas pendidikan yang diperlukan untuk penyelenggaraan proses pendidikan di sekolah. Ini merupakan bagian penting dari administrasi pendidikan secara keseluruhan. Maka berdasarkan pemikiran tersebut penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul “Manajemen Pembiayaan Pembangunan Fasilitas Pendidikan di Sekolah Dasar”, agar dana bantuan pembangunan fasilitas di sekolah benar-benar dimanfaatkan secara efektif dan efisien sehingga terwujudnya fasilitas pendidikan yang tepat dan sesuai, serta mendukung proses pembelajaran yang berkualitas.

## **1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Pengelolaan keuangan sekolah didasari pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yaitu prinsip transparansi, akuntabel, efektif, dan efisien. Peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa keempat prinsip tersebut digunakan dalam proses pengelolaan keuangan sekolah yang dimulai dari perencanaan, realisasi

penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan, pengawasan dan pemeriksaan hingga pertanggungjawaban sekolah baik negeri maupun sekolah swasta memiliki tugas yang sama untuk mengelola keuangan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan.

Dari sisi kegiatan, manajemen keuangan pendidikan, penganggaran dan pembiayaan pendidikan meliputi upaya memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban (Lipham, 1985; Keith, 1991).

Dalam pelaksanaan manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan itu, juga ada beberapa tahapan penting yang perlu dilaksanakan, di antaranya tahap perencanaan keuangan (*financial plan*), penganggaran (*budgeting*), pelaksanaan pembukuan (*accounting*) dan tahap penilaian atau *auditing* (Jones, 1985).

Dari pendapat di atas, dapat ditarik gambaran umum bahwa pembiayaan dalam pembangunan fasilitas pendidikan harus dikelola dengan baik, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban, pengawasan dan pelaporan agar sekolah sebagai organisasi atau institusi pendidikan berjalan efektif dan efisien dalam melaksanakan fungsi memberikan layanan pendidikan yang berkualitas tinggi.

Fenomena di lapangan menunjukkan banyak sekolah yang membutuhkan ruangan kelas beserta alat peraga pendidikan tetapi masih ada sekolah yang dalam proses perencanaan pembangunan dan pengadaan fasilitas pendidikan yang masih bergantung pada bantuan pemerintah, sehingga fasilitas yang diterima kadang kurang sesuai dengan kebutuhan yang ada serta menyebabkan apa yang seharusnya dibutuhkan pada saat itu bisa terpenuhi dalam selang waktu yang lama (Prastowo, 2018).

Dalam hal pelaksanaan pembangunan fasilitas pendidikan yang dilaksanakan melalui metode swakelola yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh sekolah, terjadi permasalahan dan banyak ketidaksesuaian dalam hal pengerjaannya. Hal ini disebabkan banyak kepala sekolah yang tidak memahami petunjuk teknis pelaksanaan bantuan (Saifuddin, 2014).

Menurut Minsih, dkk. (2019), di lapangan ditemukan adanya kepala sekolah yang tidak mampu tidak mampu membagi waktu antara tugas mengelola sekolah

dengan mengelola pembangunan dan pengadaan fasilitas pendidikan. Begitu pun guru yang diberi tugas tambahan sebagai bendahara yang tidak memiliki keterampilan manajerial keuangan. Bukti-bukti pencatatan tidak lengkap, pembelian barang dan upah pekerja pelaksanaan bantuan pembangunan fasilitas pendidikan belum didukung dengan bukti yang sah.

Pada aspek pemeliharaan dan penggunaan juga masih belum optimal. Perawatan fasilitas pendidikan yang ada dilakukan disaat kegiatan di sekolah tidak terlalu padat. Keadaan tersebut terjadi karena sekolah mempunyai keterbatasan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas. Kurangnya pengetahuan dari pengguna menyebabkan fasilitas yang ada tidak digunakan sebagaimana mestinya sehingga mengalami kerusakan. Tempat-tempat penyimpanan atau gudang untuk menyimpan fasilitas pendidikan tidak ada sehingga ada penumpukan fasilitas pendidikan yang rusak atau tidak terpakai di tempat-tempat penyimpanan. Bahkan fasilitas yang masih baik kondisinya karena tempat penyimpanan yang kurang menjadi rusak dan tidak bisa digunakan lagi (Prastowo, 2018).

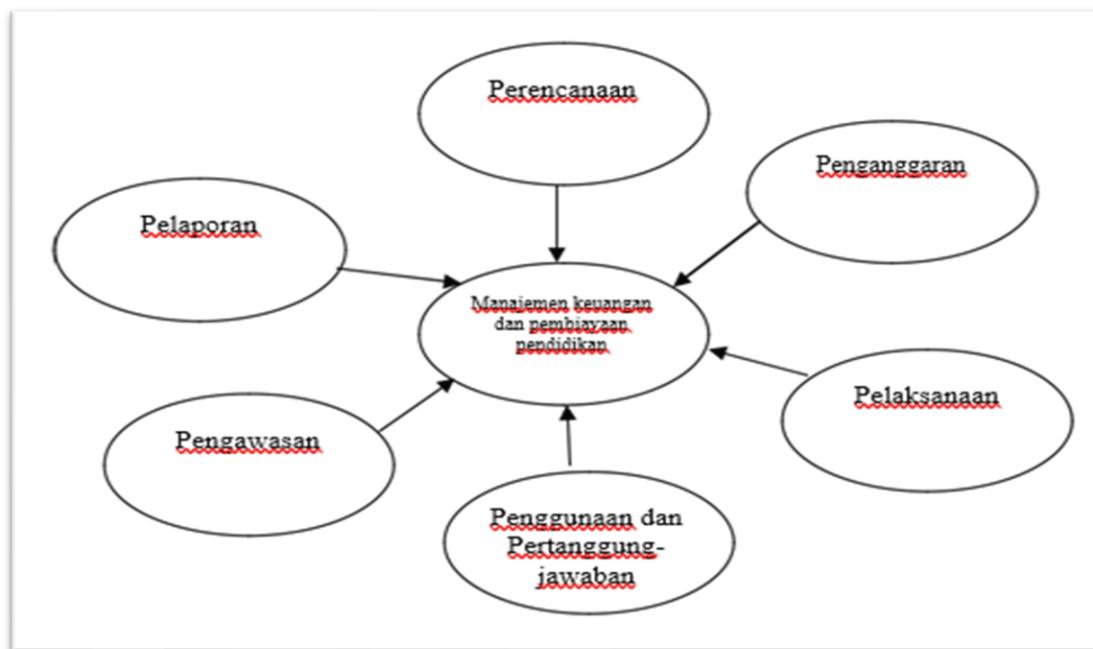
Putra (2018) menyatakan kurangnya pemahaman atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mengatur atau mengelola aset milik negara/daerah, serta kurangnya pengetahuan tentang bagaimana mengelola fasilitas pendidikan menjadi kendala bagi peningkatan mutu pembelajaran dan berdampak pada pemborosan anggaran yang tidak sedikit.

Urgensi fasilitas pendidikan tidak hanya berkaitan dengan tingkat kondusifitas sekolah terkait dengan belajar peserta didik, tetapi juga sekaligus menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan operasional lembaga pendidikan (Bahris, 2019). Bonafiditas kepemimpinan, citra suatu lembaga pendidikan dan kepercayaan masyarakat atas suatu lembaga pendidikan terkait juga dengan fasilitas pendidikan yang dimilikinya.

Ketersedian dana untuk pembangunan fasilitas pendidikan di sekolah perlu dikelola dengan sungguh-sungguh guna membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan (Fathurrahman & Dewi, 2019). Seiring dengan perubahan pola pemerintahan setelah diberlakukannya otonomi daerah, maka pola pendekatan

manajemen sekolah saat ini berbeda pula dengan sebelumnya, yakni lebih bernuansa otonomi. Sekolah dituntut memiliki kemandirian untuk mengatur dan mengurus kepentingan sekolah menurut kebutuhan dan kemampuan sendiri serta berdasarkan aspirasi dan partisipasi warga sekolah dengan tetap mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (Hidayat & Machali, 2012).

Secara umum, unsur-unsur manajemen pembiayaan fasilitas pendidikan di sekolah dasar dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1.4 Unsur Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan**

Sumber: Lipham, 1985; Keith, 1991; Jones, 1985; PP No. 48 Tahun 2008

### 1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian

Agar tidak meluas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dibatasi dalam bentuk rumusan masalah. Menurut Sugiyono (2009) “Rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data”. Berdasarkan permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah manajemen pembiayaan pembangunan fasilitas pendidikan pada sekolah dasar?”. Sehubungan dengan rumusan masalah tersebut maka dijabarkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Perencanaan
  - a. Fasilitas pendidikan apa saja yang dibutuhkan di sekolah dasar?
  - b. Berapakah besarnya dana yang diperlukan untuk pembangunan dan pengadaan fasilitas pendidikan?
  - c. Bagaimanakah prosedur pengajuan dari sekolah untuk mendapatkan bantuan dana pembangunan fasilitas pendidikan dari pemerintah?
  - d. Bagaimanakah prosedur pengadaan barang (alat peraga pendidikan dan buku)?
2. Penganggaran
  - a. Dari mana sumber dana pembangunan fasilitas pendidikan itu diperoleh?
  - b. Bagaimanakah proses penganggarannya?
  - c. Bagaimanakah proses pencairan dana bantuan pembangunan fasilitas pendidikan hingga sampai ke sekolah sebagai penerima bantuan?
3. Pelaksanaan
 

Bagaimanakah pelaksanaan pembangunan fasilitas pendidikan?
4. Penggunaan dan pertanggungjawaban
  - a. Bagaimanakah prosedur penggunaan anggarannya agar efisien dan efektif?
  - b. Bagaimanakah pencatatan keuangan dan pembuatan laporan pertanggungjawabannya?
  - c. Bagaimanakah penggunaan atau pemanfaatan fasilitas pendidikan tersebut?
  - d. Bagaimanakah penyimpanan (alat peraga pendidikan dan buku) dan bagaimanakah pengamanannya?
5. Pengawasan
 

Bagaimanakah mekanisme pengawasan pelaksanaan pembangunan dan pengadaan fasilitas pendidikan?
6. Pelaporan
 

Bagaimanakah mekanisme pelaporan pembiayaan pembangunan fasilitas pendidikan di sekolah dasar?

### 1.3 Kebaruan dalam Penelitian

Penelitian ini memperkenalkan unsur kebaruan (*novelty*) yang belum pernah diteliti sebelumnya. Kebaruan dari penelitian ini adalah manajemen pembiayaan

pembangunan fasilitas pendidikan di sekolah dasar secara terpadu. Keterpaduan sebagai unsur baru maksudnya adalah dua dana bantuan pemerintah dikaji dan ditelaah secara komprehensif, interkonektif dan komparatif dari aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban, pengawasan serta pelaporan. Tidak hanya menguraikan satu persatu dana bantuan pemerintah untuk pembangunan fasilitas pendidikan tetapi dikaji secara komprehensif dan ditelaah bagaimana interkoneksinya di dalam tata kelola pembiayaan pembangunan fasilitas pendidikan di sekolah dasar, sehingga menghasilkan sebuah model manajemen pembiayaan pembangunan fasilitas pendidikan yang bisa memperbaiki berbagai kesulitan dan masalah praktis yang terjadi di lapangan secara ilmiah.

Berbeda dengan Pusvitasari dan Sukur (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Manajemen Keuangan Sekolah Dalam Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan (Studi kasus di SD Muhammadiyah 1 Krian, Sidoarjo)” menganalisis dan memahami tentang manajemen keuangan sekolah dalam pemenuhan sarana prasarana pendidikan di SD Muhammadiyah 1 Krian, Sidoarjo, Jawa Timur melalui perencanaan anggaran (*budgeting*) sekolah, penyerapan anggaran sekolah, pembukuan (*accounting*) keuangan sekolah, pertanggungjawaban (akuntabilitas) keuangan sekolah.

Begitu pula berbeda dengan riset yang dilakukan oleh Azhari dan Kurniady (2016), yang menyatakan proses tahapan manajemen pembiayaan hanya melalui tahapan perencanaan pembiayaan pendidikan, tahapan pelaksanaan pembiayaan, dan pengawasan pembiayaan pendidikan.

Selanjutnya, Cheristiyanto et al. (2017) mengembangkan sistem manajemen keuangan sekolah melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan peningkatan kualitas. Demikian pula, Anggraini (2019) mendeskripsikan pengelolaan dana pendidikan di SMPN 1 dan SMPN 3 Pringabaya, mulai dari tahap perencanaan, tahap implementasi, hingga tahap evaluasi. Nurulia et al. (2021) menyatakan untuk mencapai mutu sekolah yang baik dalam pengelolaan biaya pendidikan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan akuntabilitas.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang mengkaji masalah-masalah yang terjadi dilapangan secara terpisah-pisah. Penelitian ini menggagas dan

mengembangkan keterpaduan unsur-unsur manajemen pembiayaan (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban, pengawasan, serta pelaporan) sehingga masalah-masalah yang dimunculkan dalam penelitian bisa dicarikan solusinya dalam bentuk model yang memiliki kontribusi secara keilmuan untuk bidang studi administrasi pendidikan dan secara praktis mengatasi masalah-masalah yang terjadi di sekolah

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan suatu keinginan peneliti untuk mencari sebuah jawaban atas permasalahan yang ada. Dengan kata lain, tujuan penelitian berkaitan dengan hasil yang diperoleh setelah penelitian berakhir. Tujuan penelitian dapat dilihat dari dua konteks, yaitu tujuan penelitian secara umum dan tujuan penelitian secara khusus. Adapun tujuan umum dan tujuan khusus penelitian ini, yaitu:

##### 1. Tujuan Umum

Secara umum tujuan penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan sebuah model manajemen pembiayaan pembangunan fasilitas pendidikan yang efektif dan efisien, sehingga dana yang dialokasikan oleh pemerintah terbebas dari pemborosan, penyalahgunaan, dan korupsi.

##### 2. Tujuan Khusus

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Teranalisisnya kebutuhan fasilitas pendidikan di sekolah dasar.
- b. Teranalisisnya besarnya dana yang digunakan untuk pembangunan fasilitas pendidikan di sekolah dasar.
- c. Untuk menganalisis prosedur pengajuan dari sekolah untuk memperoleh dana pembangunan fasilitas pendidikan di sekolah dasar.
- d. Teranalisisnya prosedur pengadaan fasilitas pendidikan di sekolah dasar.
- e. Untuk mendapatkan informasi dari mana sumber dana pembangunan fasilitas pendidikan diperoleh.
- f. Teranalisisnya proses penganggaran bantuan pembangunan fasilitas pendidikan.
- g. Teranalisisnya mekanisme pencairan dana bantuan pembangunan fasilitas pendidikan.

- h. Teranalisisnya pelaksanaan pembangunan fasilitas pendidikan di sekolah dasar.
- i. Teranalisisnya penggunaan anggaran oleh sekolah dalam proses pembangunan fasilitas pendidikan.
- j. Teranalisisnya proses pencatatan keuangan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban pembiayaan pembangunan dan pengadaan fasilitas pendidikan di sekolah dasar.
- k. Teranalisisnya proses pengawasan pembangunan fasilitas pendidikan di sekolah dasar.
- l. Teranalisisnya penggunaan atau pemanfaatan fasilitas pendidikan
- m. Teranalisisnya proses penyimpanan (alat peraga pendidikan dan buku) serta bagaimana pengamanannya?
- n. Teranalisisnya proses pelaporan dari sekolah atas penerimaan bantuan pembangunan fasilitas pendidikan.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik itu bagi peneliti maupun bagi semua pihak pengembang ilmu pengetahuan. Secara terperinci kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran teoritis yang dapat memperkaya khazanah keilmuan administrasi tentang bagaimana mengelola pembiayaan pembangunan fasilitas pendidikan yang bersumber dari APBD dan APBN di sekolah dasar yang efektif dan efisien berdasarkan bukti-bukti empiris.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi peneliti**

- 1. Mengembangkan konsep berfikir secara sistematis melalui tahapan penelitian yang sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian yang dikembangkan.
- 2. Pengalaman dalam membina hubungan saling percaya antara peneliti dengan nara sumber dalam penelitian.

3. Pengalaman mengeksplorasi teori dan konsep yang mendukung menjadi suatu konsep baru atau hipotesis berdasarkan hasil penelitian kualitatif yang dilaksanakan.
4. Peningkatan wawasan, pengetahuan serta aplikasi konsep/teori dalam lingkup ilmu administrasi pendidikan khususnya dalam manajemen pembiayaan sekolah.
  - b. Bagi lembaga
    1. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih luas khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi praktisi pendidikan.
    2. Memberikan informasi mengenai efektivitas model manajemen pembiayaan pembangunan fasilitas pendidikan yang bersumber dari APBD dan APBN di sekolah dasar sehingga dapat diadopsi dan diadaptasi oleh sekolah dasar yang berada di wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.
    3. Memberikan rekomendasi khususnya bagi sekolah dasar yang berada di wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dalam mengelola pembiayaan pembangunan fasilitas pendidikan yang bersumber dari berbagai bantuan agar tercapai hasil yang efektif dan efisien.

## **1.6 Struktur Organisasi Disertasi**

BAB I Pendahuluan. Meliputi sub bagian latar belakang penelitian yang merupakan latar belakang mengenai topik atau isu yang diangkat serta memosisikan topik yang diteliti dalam konteks penelitian yang lebih luas dan menyatakan adanya gap (rumpang) yang perlu diisi dengan melakukan pendalaman terhadap topik yang diteliti. Sub bagian identifikasi masalah penelitian memuat identifikasi spesifik mengenai permasalahan yang diteliti, rumusan masalah penelitian disusun dalam bentuk pertanyaan penelitian yang disesuaikan dengan sifat dan kompleksitas penelitian yang dilakukan dengan tetap mempertimbangkan urutan dan kelogisan posisi pertanyaannya. Sub bagian tujuan penelitian menjelaskan tujuan dari penelitian sehingga terlihat jelas cakupan yang diteliti, sub bagian manfaat penelitian memberikan gambaran mengenai nilai lebih atau kontribusi yang diberikan dari hasil penelitian dan sub bagian struktur organisasi disertasi menggambarkan isi kandungan setiap bab, urutan penulisannya, serta keterkaitan antara bab dalam membentuk sebuah kerangka utuh disertasi.

BAB II Tinjauan Pustaka, untuk menunjukkan perkembangan termutakhir dalam dunia keilmuan atau *state of the art* dari teori yang sedang di kaji mengenai manajemen pembiayaan pembangunan fasilitas pendidikan di sekolah dasar serta untuk mendudukan masalah penelitian dalam bidang ilmu yang diteliti. Kemudian pada bab ini disajikan mengenai preposisi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilaksanakan serta memuat tentang kerangka berfikir penelitian yang menjelaskan secara garis besar alur logika dari penelitian yang dilaksanakan.

BAB III Metodologi Penelitian. Untuk mengetahui bagaimana peneliti merancang alur penelitian mulai dari metode penelitian yang digunakan, lokasi dan objek tempat dilakukannya penelitian, kemudian diuraikan data/informasi yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan, menetapkan pihak-pihak yang menjadi responden penelitian, menampilkan instrumen yang digunakan untuk memperoleh data penelitian baik yang bersifat kaji dokumen, wawancara, observasi/pengamatan serta kuesioner, menjelaskan mengenai bagaimana langkah-langkah data tersebut diperoleh, kemudian bagaimana analisis pengolahan data yang dilakukan mulai dari, sampai pada bagaimana data yang telah diperoleh kemudian disajikan.

BAB IV Temuan dan Pembahasan. Bagian ini berisi tahapan pengungkapan temuan penelitian yang diperoleh pada proses pengumpulan data yang kemudian telah melalui proses analisis pengolahan data dan berisi tentang pembahasan atau komentar peneliti terhadap temuan dengan dukungan dari teori, konsep dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung atau tidak mendukung terhadap hasil penelitian yang dikemukakan. Pada bab ini juga dikaji pengembangan dan pengujian model yang digagas oleh peneliti sebagai luaran penelitian disertasi.

BAB V Kesimpulan, Implikasi dan Rekomendasi. Berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis terhadap temuan dan pembahasan hasil penelitian. Implikasi serta rekomendasi yang dirumuskan untuk penerapan dan pengembangan lebih lanjut dari kajian mengenai manajemen pembiayaan pembangunan fasilitas pendidikan di sekolah dasar.